

LAPORAN TRIWULAN II – TPID TAHUN 2025

Pengendalian Inflasi Provinsi NTT



Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT

Laporan Triwulan II
Pengendalian Inflasi Provinsi NTT

I. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH DAN ATAU PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN PENTING, BARANG LAINNNYA DAN JASA SERTA RESIKO KEDEPAN.

Januari	2025	-0,06 % (Y-on-Y), -0,27 % (M-to-M)
Februari	2025	0,47 % (Y-on-Y), 0,37 % (M-to-M)
Maret	2025	1,86 % (Y-on-Y), 1,24 % (M-to-M)
April	2025	1,77 % (Y-on-Y), 0,22 % (M-to-M)
Mei	2025	1,60 % (Y-on-Y), -0,40 % (M-to-M)
Juni	2025	1,72 % (Y-on-Y), -0,11 % (M-to-M)

- Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan APRIL 2025 Y-on-Y mengalami INFLASI sebesar 1,77% lebih rendah dari bulan sebelumnya (Maret =1,86%), yang berarti berada pada kisaran bawah Target Rentang Sasaran (2,5±1%) Secara Nasional, angka inflasi NTT berada pada urutan ke 14 Provinsi terendah, dimana angka inflasi Nasional adalah 1,95% (Y-on-Y); Sedangkan Perhitungan IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan April 2025 Y-on-Y adalah:
 - 1) Kota Kupang (0,91%),
 - 2) Maumere (2,35%)
 - 3) Waingapu (2,37%), mencerminkan Inflasi Urban.
 - 4) Kabupaten Ngada (1,97%) dan
 - 5) Kabupaten TTS (3,41%), mencerminkan Inflasi Urban + Inflasi RuralINFLASI Tertinggi ada di Kabupaten TTS dan terendah di Kota Kupang.

- Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan MEI 2025 Y-on-Y mengalami INFLASI sebesar 1,60% lebih rendah dari bulan sebelumnya (April =1,77%), yang berarti berada pada kisaran bawah Target Rentang Sasaran (2,5±1%) Secara Nasional, angka inflasi NTT berada pada urutan ke 19 Provinsi terendah, dimana angka inflasi Nasional adalah 1,60% (Y-on-Y) sama dengan inflasi NTT; Sedangkan Perhitungan IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Mei 2025 Y-on-Y adalah:
 - 1) Kota Kupang (0,71%),
 - 2) Maumere (2,01%)
 - 3) Waingapu (2,06%) mencerminkan Inflasi Urban.
 - 4) Kabupaten Ngada (1,36%) dan
 - 5) Kabupaten TTS (3,59%), mencerminkan Inflasi Urban + Inflasi RuralINFLASI Tertinggi ada di Kabupaten TTS dan terendah di Kota Kupang.

- Inflasi Tahunan Provinsi NTT Bulan JUNI 2025 Y-on-Y mengalami INFLASI sebesar 1,72% naik sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Mei =1,60%), namun masih berada pada kisaran bawah Target Rentang Sasaran (2,5±1%) Secara Nasional, angka inflasi NTT berada pada urutan ke 17 Provinsi terendah, dimana angka inflasi Nasional adalah 1,87% (Y-on-Y) sama dengan inflasi NTT; Sedangkan Pengukuran IHK pada 5 wilayah di Provinsi NTT Bulan Juni 2025 Y-on-Y adalah:
 - 1) Kota Kupang (0,53%),
 - 2) Maumere (3,44%)
 - 3) Waingapu (3,19%), mencerminkan Inflasi Urban.
 - 4) Kabupaten Ngada (1,43%) dan
 - 5) Kabupaten TTS (3,92%), mencerminkan Inflasi Urban + Inflasi Rural

Kab TTS mengalami inflasi yang paling tinggi, berada sedikit di atas kisaran target rentang sasaran ($2,5\pm 1\%$), Sedangkan Kota Kupang mengalami inflasi terendah dan berada di bawah target rentang sasaran.

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Kendala yang dihadapi

- Mencermati perkembangan inflasi terkini dan beberapa indikator harga pada Tirwulan II tahun 2025, Provinsi NTT diperkirakan mengalami inflasi pada titik tengah target sasaran inflasi nasional tahun 2025.
- Inflasi berpotensi didorong oleh komoditas cabai-cabean dan bawang putih. Sementara itu, penurunan tarif angkutan udara, harga beras, dan ikan-ikanan dapat menjadi penahan inflasi.

2. Klasifikasi permasalahan :

a) Ketersediaan pasokan :

➤ Pola Inflasi NTT

Beras :

- a. Sebagian besar pasokan beras di Provinsi NTT masih harus didatangkan dari luar daerah seperti Sulsel, NTB, Jatim dan Import.
- b. Komoditas beras memberikan andil sebesar 0,20 % terhadap inflasi

Ikan-ikanan

- a. Konsumsi ikan di NTT cukup tinggi sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi secara keseluruhan.
- b. Komoditas ikan tongkol, ikan layang, ikan selar, ikan tuna, ikan tembang turut memberikan andil terhadap inflasi

Hortikultura

- a. Komoditas hortikultura seperti cabai rawit, bawang merah, jeruk nipis, kelapa, tahu mentah turut memberi andil inflasi.
- b. Komoditas hortikultura sayuran seperti terong, bunga pepaya, kangkung, sawi hijau, sawi putih, dan bayam memberikan andil inflasi, dimana sebagian besar diproduksi oleh petani lokal NTT.

Daging Ayam :

- a. Komoditas ayam hidup turut memberi andil Inflasi.

Daging babi :

- a. Komoditas Daging Babi memberi andil Inflasi.

b) Keterjangkauan harga :

- Komoditas yang sering kali menjadi faktor utama deflasi/inflasi di NTT sebagian besar berasal dari kelompok *Volatile Foods*, antara lain beras, daging dan telur ayam ras, bawang merah dan putih, cabai merah dan rawit, dan ikan. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, sehingga memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi.
- Permasalahan yang dihadapi antara lain produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP) di NTT yang rendah di bawah nasional sehingga sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari luar daerah.

c) Kelancaran distribusi :

- Pemetaan menggunakan *Global Neighboring Area* untuk mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat ketergantungan berbeda terhadap inflasi NTT. Wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua memiliki dampak langsung terhadap inflasi di NTT. Sementara itu, wilayah lainnya memiliki dampak tidak langsung melalui perantara atau faktor lain.

d) Komunikasi efektif :

- Adanya koordinasi dari berbagai *stakeholder* terkait tentang pentingnya pengendalian inflasi secara kontinyu namun perlu dioptimalkan.

III. PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Upaya Pengendalian Inflasi oleh Provinsi NTT, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT (TPID NTT) berupa kegiatan melakukan pengendalian Inflasi diantaranya:

- 1) TPID Provinsi NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin Oleh Mendagri secara *hybrid* setiap hari Senin.
- 2) Mengikuti Panen Raya Sawah Sinode GMIT Kelompok Tani Sulamanda dalam rangka pengendalian inflasi pangan di Desa Air Mata Kabupaten Kupang
- 3) Kepala Biro PAP dan TPID NTT menghadiri GNPIP wilayah Balinusra; selanjutnya mewakili Sekda NTT dengan Sekda NTB dan Sekda Bali menyampaikan Materi pada Rakorwil Pengendalian Inflasi wilayah TPIP-TPID Balinusra; di kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, 23 Mei 2025.
- 4) TPID NTT melaksanakan Sidak Pasar di Pasar Kasih Naikoten II, untuk mengetahui kondisi harga konsumen yang memicu deflasi *MtM*.
- 5) Gubernur NTT Bersama TPID NTT sidak pasar di TPI Oeba dan pasar Inpres Naikoten, pemantauan komoditi pemicu deflasi *MtM*, 24 Juni 2025
- 6) Wakil Gubernur NTT Bersama TPID NTT mengikuti RAKORNAS Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri secara *hybrid* pada hari Senin, 30 Juni 2025.
- 7) Pasar Murah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan pada tanggal 3 - 5 Juni 2025 menjelang HBKN Idul Adha.

IV. EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH.

1. Berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID Provinsi NTT dan TPID Kabupaten/Kota se NTT kurun waktu April 2025 s/d Juni 2025 sudah sesuai (*On The Track*) sehingga tercatat perkembangan inflasi YoY Provinsi NTT ke arah yang lebih baik yaitu :

April	2025	1,77 % (Y-on-Y),	0,22 % (M-to-M)
Mei	2025	1,60 % (Y-on-Y),	-0,40 % (M-to-M)
Juni	2025	1,72 % (Y-on-Y),	-0,11 % (M-to-M)
2. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Bersubsidi dan Non Subsidi tersebut tetap dan akan dilaksanakan pada waktu – waktu selanjutnya.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH:

High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi NTT tanggal 5 Maret 2025 menghasilkan 13 (tiga belas) butir rekomendasi sebagai berikut:

1. **Pembentukan SATGAS Pengendalian Inflasi NTT** yang bertugas antara lain untuk memverifikasi keadaan yang sesungguhnya, memberi arahan, penguatan kepada pelaku ekonomi, pelaku pasar untuk secara bersama sama bertanggung jawab mengendalikan inflasi daerah;
2. Mendorong **Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen** (berupa tanaman bahan makanan/hortikultura) untuk mendukung ketersediaan stok pangan yang berbasis kebutuhan pasar dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan kebun masyarakat sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi;

3. Mendorong **percepatan hilirisasi** produksi pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi aneka produk turunan seperti, sambal, saus tomat, dendeng, se'i, bakso, abon dan lain-lain untuk meningkatkan *added value* dan mewujudkan *One Village One Product (OVOP)*;
4. Memfasilitasi dan mendukung **pemanfaatan penerapan teknologi** pengolahan yang tepat guna sehingga proses produksinya modern, efisien dan setiap produk memenuhi standar sehat;
5. Memastikan **pasar yang menyerap produk-produk masyarakat** dan atau menghubungkan produsen, *off-taker*, dan konsumen untuk membeli setiap produk secara kontinyu;
6. Memitigasi **dampak perubahan iklim** sehingga penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan dapat dihindari supaya tidak merugikan produsen;
7. Perlu **mendorong generasi melinial dan generasi Z** secara sistematis agar mau menjadi petani, peternak dan nelayan modern;
8. Pemanfaatan **Dana Desa yang tepat sasaran**, untuk mendukung Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok masyarakat yang ada di 3.137 Desa di Provinsi NTT dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMDes;
9. Bulog Provinsi NTT agar terus melaksanakan **penyerapan Beras Lokal** yang diproduksi oleh petani di NTT dengan harga yang memadai;
10. Meningkatkan **akses keuangan bagi pelaku usaha** Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan melalui program Kredit Merdeka oleh Bank NTT, dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) oleh Himpunan Bank Negara (Himbara), Bank Swasta dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
11. Implementasi **digitalisasi PKB** dan memberikan insentif sebagai *sweetener* bagi Wajib Pajak yang menyetor melalui kanal digital;
12. Implementasi **digitalisasi Retribusi Parkir** dan Rekreasi dan memberikan insentif sebagai *sweetener* bagi Wajib Retribusi yang menyetor melalui kanal digital;
13. **Mendorong Koperasi** Simpan Pinjam agar lebih memberdayakan usaha-usaha pada sektor Riil / Sektor Produktif, dengan model inkubasi dan non inkubasi.

Kupang, Juli 2025

KEPALA BIRO
PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DESERTA PROVINSI NTT,



Selfi H. Nange, S.Sos., M.Si., M.Pub, Pol

Pembina Tk.I

NIP. 197606091995032001